

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Provinsi yang merupakan Provinsi terkecil kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta ini memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari total seluruh luas wilayah Indonesia yaitu 1.860.359,67 km². Daerah yang posisinya terletak diantara 7°.33'-8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00'- 110°.50' Bujur Timur terdiri atas satu kota dan empat kabupaten yaitu :

1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km²
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km²
3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km²
4. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km²
5. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km²

Dari 4 kabupaten dan 1 kota tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km². Kabupaten Gunung Kidul memiliki luas wilayah terbesar yaitu sebesar 1.485,36 km² atau 46,63% dari seluruh luas wilayah Propinsi DIY. Sedangkan daerah yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kota

Yogyakarta dengan luas wilayah 32,50 km² atau sekitar 1,02% dari luas wilayah Provinsi.

Dari tahun ke tahun investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan, baik investasi domestik maupun investasi asing. Investasi pemerintah banyak yang diarahkan pada sektor pelayanan publik dan juga sektor swasta. Investasi sektor industri mengalami pertumbuhan baik untuk industri kecil, menengah, dan besar dengan dominasi industri kerajinan serta industri tekstil dan kulit.

Industri kreatif di bidang pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi berupa desa wisata sebanyak 60 desa yang tersebar di 4 Kabupaten yang diminati oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Industri pariwisata memiliki sumbangan paling besar terhadap PDRB melalui subsektor perdagangan, perhotelan, restoran dan jasa-jasa lainnya. Jasa perhotelan adalah yang paling dominan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa-jasa lainnya. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan. Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi problematika sosial yang cukup serius karena karakter pengangguran di daerah tersebut menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat pendidikan tinggi.

Dari data terakhir Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2012 menyatakan ketersediaan energi provinsi DIY saat ini sebesar 3.085 kkal/kapita/hari (Nasional 2.500 kkal/kapita/hari). Angka konsumsi energi di DIY sudah melampaui standar, yaitu sebesar 1.835,93 kkal/kap/hari sedangkan angka konsumsi protein masih belum memenuhi angka standar karena baru mencapai angka 51,04 g/kap/hari.

Masalah kesejahteraan sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat yang ditunjukkan oleh besarnya jumlah pengangguran dan kelompok marginal seperti anak terlantar/ jalanan, tuna susila, pengemis, gelandangan, korban bencana alam, korban tindak kekerasan dan lain sebagainya. Lembaga/ organisasi serta infrastruktur untuk penanganan dan pengelolaan masalah kesejahteraan sosial masih kurang memadai. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan

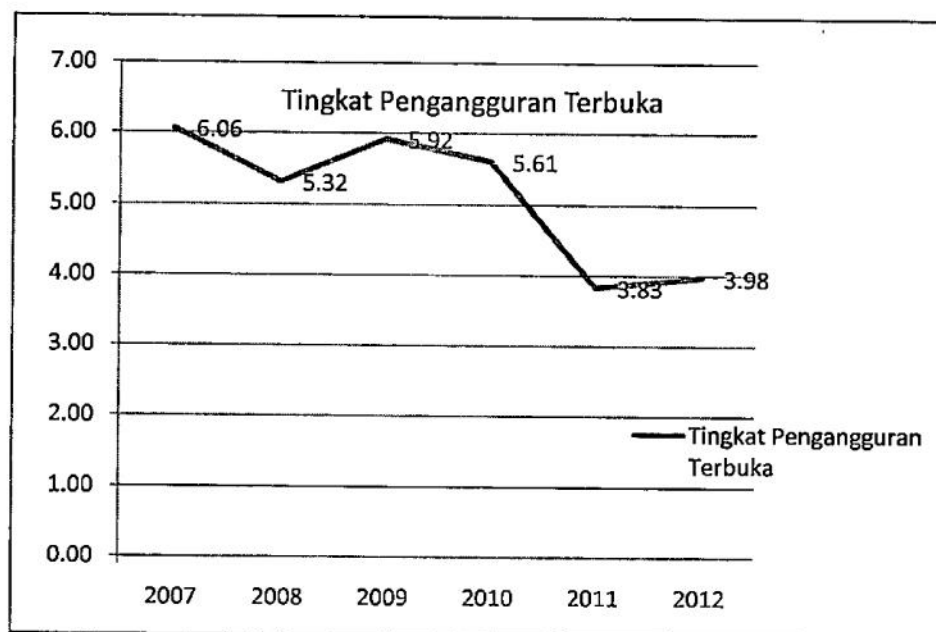
B. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka DIY

Proporsi distribusi penduduk berdasarkan usia produktif memiliki akibat pada sektor tenaga kerja. Angkatan kerja di DIY pada 2012 sebesar 1.869.720. Di sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa-jasa lainnya. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan. Pengangguran di DIY menjadi problematika sosial yang cukup serius karena karakter pengangguran DIY menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat pendidikan tinggi.

Pengangguran di daerah-daerah Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, tingkat pengangguran Indonesia pada umumnya dibawah 5 persen. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah para pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan melihat jumlah orang yang menganggur atau pengangguran terbuka bagi dengan angkatan kerja dan dikalikan 100%. Tingkat Pengangguran Terbuka DIY selama 2007-2012 cenderung mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2011 sebesar 3,83% mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,61%. Dan pada tahun 2011 Tingkat Pengangguran Terbuka DIY mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan presentase sebesar 3,98%. Tingkat Pengangguran Tertinggi DIY selama periode tahun 2007-2012 terjadi pada tahun 2007 dimana presentase tingkat pengangguran DIY pada tahun tersebut sebesar 6,06%. Dan mencapai tingkat terendah pada tahun 2011 dimana pada tahun tersebut Tingkat Pengangguran Terbuka DIY mempunyai presentase sebesar 3,83%.

Gambar 4.1
Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber; BPS(data diolah)

C. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka DIY

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan jumlah tingkat penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja. TPT memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. TPT diukur sebagai presentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Data ketenagakerjaan tersebut diperoleh dari hasil survei Sakernas (BPS, 2013).

Tabel 4.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta
(persentase)

Kabupaten /	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kulonprogo	4,34	3,56	4,31	4,18	2,56	3,91
Bantul	5,17	5,06	5,85	5,24	3,80	3,60
Gunungkidul	3,39	3,29	3,94	4,04	1,97	1,92
Sleman	7,75	6,83	7,43	7,17	5,25	5,42
Yogyakarta	9,65	7,85	8,07	7,41	5,57	5,03
Rata-rata	6,06	5,32	5,92	5,61	3,83	3,98
DIY	6,1	5,38	6	5,69	3,97	3,97
Nasional	9,11	8,39	7,87	7,14	6,56	6,14

Sumber; BPS(data diolah)

Dari data tabel 4.1 diatas, dapat dilihat presentase Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 di setiap Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tahun ke tahun Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami fluktuasi. Dilihat menurut kabupaten/ kota selama periode 2007 sampai 2012, Kabupaten Gunungkidul mempunyai TPT terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,97%, sedangkan TPT tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 9,65% yaitu pada tahun 2007. Jika dibandingkan dengan angka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul selalu lebih rendah.

D. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan Perubahan berupa peningkatan maupun penurunan dari aktivitas perekonomian domestik yang ditunjukkan

melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) yang merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu (satu tahun).

Pada tahun 2010 Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami bencana alam yaitu meletusnya Gunung Merapi, namun bencana tersebut tidak mengakibatkan perubahan yang besar pada Laju Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/ kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Terbukti dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang tetap meningkat pada tahun tersebut di setiap Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta kecuali satu daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Kulonprogo. Pada tahun 2010 daerah Kulonprogo mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 3,06%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan nilai rata-rata empat persen, kecuali tahun 2009, ketika gejolak krisis keuangan global terjadi. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta selalu lebih rendah dari pada Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Presentase terkecil Laju Pertumbuhan terendah dialami Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2010, dimana presentase Laju Pertumbuhan saat itu diposisi 3,06%. Dan pada tahun 2012 Kota Yogyakarta memiliki presentase Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi selama periode tahun 2007 sampai 2012, yaitu sebesar 5,76 yang bisa dilihat di tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (persentase)

Kabupaten / Kota	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kulonprogo	4,12	4,71	3,97	3,06	4,95	5,01
Bantul	4,52	4,90	4,47	4,97	5,27	5,34
Gunungkidul	3,91	4,39	4,14	4,15	4,33	4,84
Sleman	4,61	5,13	4,48	4,49	5,19	5,45
Yogyakarta	4,46	5,12	4,46	4,98	5,64	5,76
Rata-rata	4,32	4,85	4,30	4,33	5,08	5,28
DIY	4,31	5,03	4,43	4,88	5,16	5,33
Nasional	6,3	6,1	4,6	6,1	6,5	6,2

Sumber; BPS(data diolah)

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah menunjukkan Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto daerah tersebut, dan nantinya akan berdampak pada peningkatan PDRB Perkapita. Angka PDRB Perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk DIY walaupun angka tersebut belum menggambarkan pasti penerimaan penduduk secara nyata dan merata.

E. Perkembangan Angkatan Kerja DIY

Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja (15-65 tahun). Baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dsb.

Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) atau sering disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. TPK sendiri dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk dalam usia kerja dan dapat pula dinyatakan untuk suatu kelompok penduduk tertentu seperti kelompok laki-laki atau wanita di kota, kelompok tenaga terdidik, kelompok umur 10-15 di desa dan lain-lain.

Semakin besar TPK, semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin besar jumlah angkatan kerja dan akibatnya TPK semakin kecil (Simanjuntak, 1998:97).

Jumlah angkatan kerja DIY menurut data BPS pada tahun 2012 sebanyak 1.944.858 orang atau sebesar 70,85 % dari total penduduk DIY berumur 15 tahun keatas. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2012 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 yang jumlahnya 1.872.912 orang. Dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY tahun 2012, sebanyak 68,04% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 2,81% merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan membandingkan antara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja.

Tabel 4.3

Jumlah Angkatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta (ribu jiwa)

Kabupaten / Kota	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kulonprogo	210	218	222	220	208	226
Bantul	489	517	530	494	490	507
Gunungkidul	412	432	432	387	366	422
Sleman	548	577	573	572	593	575
Yogyakarta	228	253	257	206	214	212
Rata-rata	337	399	403	376	374	388
DIY	1.889	1.999	2.016	1.882	1.872	1.944

Sumber; BPS(data diolah)

Menurut data tabel 4.3, pada periode 2007 sampai 2012 jumlah angkatan kerja Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi. Salah satu contoh penyebab fluktuasi tersebut adalah bencana alam erupsi gunung merapi yang menyebabkan penurunan rata-rata diseluruh Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010. Sedangkan untuk keseluruhan rata-rata jumlah angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling kecil sebesar 206.433 jiwa pada tahun 2010 di Kota Yogyakarta. Sedangkan yang angkatan kerja yang tertinggi terdapat pada daerah Sleman yaitu sebesar 593.046 jiwa pada tahun 2011.

F. Perkembangan Pendidikan DIY

Dimata penduduk berkembang, pendidikan dipandang sebagai sarana guna meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Atau dalam bahasa lain, tujuan akhir dari program pendidikan adalah

teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Setidaknya masyarakat yang telah mengenyam pendidikan setelah selesai mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih berkelas di sektor formal. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan yang mereka dapatkan kelak. Semakin lama jangka waktu yang masyarakatkan habiskan untuk mendapatkan pendidikan semakin tinggi atau bermartabat pula pekerjaan yang mereka dapatkan dan semakin terhindar mereka dari masalah pengangguran.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan mempunyai banyak lembaga pendidikan yang tersebar di setiap kabupaten dan kota. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai Sekolah Menengah sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah sampai ke pelosok desa. Jumlah SD/MI yang ada di Provinsi DIY pada tahun 2008 adalah sejumlah 2.035, SMP/MTs/SMP Terbuka sejumlah 529, dan SMA/MA/SMK sejumlah 381 sekolah negeri maupun swasta. Ketersediaan ruang belajar dapat dikatakan sudah memadai dengan rasio siswa per kelas untuk SD/MI : 22, SMP/MTs : 33, SMA/MA/SMK : 31. Sedangkan tingkat ketersediaan guru di Provinsi DIY juga cukup memadai dengan rasio siswa per guru untuk SD/MI: 13, SMP/MTs: 11, SMA/MA/SMK: 9. Untuk tahun 2010 pembinaan guru jenjang SD/MI sebanyak 3.900 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 24.093 guru. Jenjang SMP/MTs sebanyak 3.939 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 12.971 guru. Dan untuk SMA/MA sebanyak 4.826 guru telah memenuhi kualifikasi dari total 15.067 guru.

Para lulusan jenjang SD/MI pada umumnya dapat melanjutkan ke SMP/MTs, sejalan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pemerintah. Pada tahun 2010, angka kelulusan SD/MI mencapai 96,47%, SMP/MTs mencapai 81,84% dan SMA/MA/SMK sebesar 88,98%. Sedangkan angka putus sekolah pada tahun yang sama sebesar 0,07% untuk SD/MI; 0,17% untuk SMP/MTs; dan 0,44% untuk SMA/MA/SMK. Sementara itu jumlah perguruan tinggi di Provinsi DIY baik negeri, swasta maupun kedinasan seluruhnya sebanyak 136 institusi dengan rincian 21 universitas, 5 institut, 41 sekolah tinggi, 8 politeknik dan 61 akademi yang diasuh oleh 9.736 dosen. Berikut ditampilkan data indeks pendidikan periode 2007 sampai 2012 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.4

Indeks Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten / Kota	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kulonprogo	76,46	76,48	77,21	78,68	79,93	79,96
Bantul	77,55	78,07	78,63	80,28	80,64	81,34
Gunungkidul	73,22	73,22	73,26	73,45	73,74	73,76
Sleman	83,44	83,44	84,08	84,63	85,65	86,4
Yogyakarta	89,36	90,51	90,8	90,86	90,98	91,08
Rata-rata	80,01	80,34	80,80	81,58	82,19	82,51
DIY	77,60	78,99	79,63	80,71	81,43	81,81

Sumber; BPS(data diolah)

Dapat diketahui dari tabel 4.4, bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2007 hingga 2012 mengalami kenaikan yang signifikan di setiap tahunnya. Dilihat menurut kabupaten/kota

selama periode tersebut Gunungkidul mempunyai indeks pendidikan terendah pada tahun 2007 yaitu sebesar 73,22. Sedangkan indeks tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 91,08 pada tahun 2012. Hal ini berarti rata-rata rasio lama sekolah dan angka melek huruf di Kabupaten Gunungkidul terendah dibandingkan empat kabupaten/kota lainnya dan yang tertinggi di Kota Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan indeks pendidikan DIY, indeks pendidikan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta selalu lebih tinggi daripada indeks pendidikan DIY.

G. Perkembangan APBN DIY

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Tabel 4.5

Realisasi Belanja Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/ Kota	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kulonprogo	93.726	91.696	40.81	46.582	77.092	147.831
Bantul	105.464	302.76	107.353	123.249	90.931	140.107
Gunungkidul	117.571	137.776	93.848	47.001	143.14	164.361
Sleman	109.56	98.394	115.846	99.812	110.781	132.536
Yogyakarta	89.996	107.286	86.735	54.04	71.351	88.335
Rata-rata	101.689	108.788	100.946	79.161	87.539	134.634
DIY	406.757	435.152	403.782	316.644	350.155	673.170

Sumber; BPS(data diolah)

Dari tabel 4.5 dapat dilihat besar belanja modal dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 di setiap Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tahun ke tahun belanja modal tersebut mengalami fluktuasi. Dilihat menurut kabupaten/kota selama periode 2007 sampai 2012, Kabupaten Kulonprogo mempunyai realisasi belanja modal terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 40,81 juta rupiah. Sedangkan belanja modal tertinggi terdapat pada Kabupaten Bantul pada tahun 2008 sebesar 302,76 juta rupiah.